

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-government merupakan suatu upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan mulai dari efisiensi layanan publik hingga keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan *e-government* di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas dalam upaya modernisasi, efisiensi administratif, mengurangi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Suprianto et al. (2019), dalam penerapan *e-government* di Indonesia salah satunya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut Soetanto et al. (2015), penerapan *e-government* dalam pengadaan barang jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, meningkatkan persaingan penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara sehat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Peraturan mengenai prosedur dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia selalu berkembang dan mengalami perubahan karena masih ditemukan kelemahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perkembangan dan perubahan yang ada dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, penemuan baru terkait pelaksanaan pengadaan, pengalaman dan

pembelajaran dari implementasi peraturan sebelumnya hingga tujuan dan tantangan yang dihadapi pemerintah. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga diperoleh barang/jasa berkualitas dengan harga terjangkau yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi fisik, keuangan dan manfaat sehingga mendukung tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat (Siallagan et al., 2022). Salah satu perkembangan dalam prosedur pengadaan elektronik (*e-procurement*) saat ini adalah dengan penerapan *e-purchasing*.

Menurut Adi (2018), *E-purchasing* digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan pasar elektronik (*e-marketplace*) dimana tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia. Pelaksanaan *e-purchasing* di Indonesia mulai banyak diterapkan pada tahun 2018. *E-purchasing* mendapatkan perhatian khusus mengingat adanya pengembangan sistem katalog pada pengadaan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis LKPP tahun 2020 – 2024 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan *e-purchasing* dengan target 90% pada tahun 2024 yang diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha dalam pengadaan minimal 40% termasuk UMKM.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan bahwa besarnya realisasi belanja suatu daerah berpengaruh pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang kemudian berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Provinsi Jawa Tengah termasuk lima provinsi dengan realisasi belanja terbesar pada tahun 2021 dan 2022. Kemudian berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis situs web per 1 Agustus 2025, Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan total paket pengadaan terbanyak dengan paket penyedia yang menggunakan sistem *e-purchasing* selama lima tahun terakhir.

Tinjauan mengenai pengadaan elektronik sudah banyak dilakukan oleh para profesional. Menurut Dooley & Purchase (2006), keterlibatan pemasok, dukungan manajerial internal, dan proyeksi keuntungan berdampak pada pengadaan secara elektronik. Sementara itu, penerapan *e-purchasing* di Indonesia, menurut Zahra et al. (2021) bahwa dengan luasnya akses pasar yang dapat dijangkau dalam proses pengadaan pemerintah pemanfaatan *e-purchasing* dinilai belum mampu mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang pemerintah dan jasa.

Meskipun lembaga sektor publik telah mengidentifikasi pengadaan secara elektronik sebagai prioritas untuk dilaksanakan, namun karena perubahan metode pengadaan yang dilakukan secara masif dapat menimbulkan beberapa kelemahan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kinerja pengadaan khususnya di Provinsi Jawa Tengah di mana pengadaan pekerjaan barang jasa melalui *e-purchasing* baru dimulai pada tahun 2022. Menurut Ahmad et al. (2019) diperlukan kajian terhadap pengalaman pemerintah dalam merubah proses pengadaan yang ada, termasuk untuk mengetahui hambatan pengadaan elektronik. Menurut Laryea (2019), diperlukan beberapa tindakan strategis untuk menghadapi dan menanggulangi kelemahan tersebut sehingga dapat mengurangi risiko yang mungkin dapat ditimbulkan.

Peningkatan pemanfaatan *e-purchasing* yang besar, ditandai dengan kenaikan jumlah paket dan anggaran pengadaan khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian turut berpengaruh pada proyek pembangunan infrastruktur. Salah satu pihak yang turut andil dalam pembangunan infrastruktur adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memelihara jalan

dan jembatan dalam kondisi baik. Penerapan *e-purchasing* di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode e-katalog mengalami beberapa kekurangan pada implementasinya. Kekurangan dan kendala yang ada turut dipengaruhi oleh peran pelaku pengadaan pada proses implementasi pengadaan dalam *e-purchasing*. Tingkat implementasi pengadaan elektronik tersebut yang kemudian berpengaruh dalam pelaksanaan proyek (Yevu et al., 2022).

Peran UMKM yang meningkat dalam pengadaan *e-purchasing* dengan metode e-katalog membuat jumlah pilihan penyedia semakin banyak. Penyedia tersebut menawarkan barang atau jasa dengan standar teknis yang sama namun dengan harga yang berbeda-beda sehingga pengguna jasa perlu menetapkan penyedia jasa yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (Imam et al., 2022). Ketepatan dalam menentukan penyedia yang akan digunakan perlu beberapa penilaian dengan menganalisis penawaran dan kriteria teknis penawaran yang mencakup lebih banyak aspek selain harga.

Rating penyedia jasa pada e-katalog memiliki peran yang sangat penting dalam membantu konsumen membuat keputusan yang tepat dan membangun kepercayaan diantara pengguna *platform*. Melalui sistem rating, pengguna dapat memberikan umpan balik langsung berdasarkan pengalaman mereka dengan penyedia jasa tertentu. Rating ini mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas layanan, ketepatan waktu, responsivitas, dan kepuasan secara keseluruhan. Pengguna yang memberikan rating memberikan wawasan berharga kepada calon konsumen, membantu mereka mengukur reputasi dan kinerja penyedia jasa sebelumnya.

Menurut Granhelmer et al. (2022), penjaminan hasil pekerjaan penyedia jasa dalam *e-purchasing* merupakan aspek yang krusial dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan penyedia layanan. Pada *platform e-purchasing*, penjaminan hasil pekerjaan sering kali tidak tercermin dalam pelaksanaannya. Penjaminan keluar dalam berbagai bentuk, seperti ulasan dan rating dari pelanggan sebelumnya, sertifikasi atau akreditasi profesional, dan garansi kualitas yang ditawarkan oleh penyedia jasa.

Ulasan dan rating memberikan gambaran langsung tentang pengalaman pelanggan sebelumnya, memungkinkan calon konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan pengalaman nyata. Sertifikasi atau akreditasi profesional juga dapat memberikan jaminan kualitas, menunjukkan bahwa penyedia jasa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidangnya.

Kekurangan dalam implementasi *e-purchasing* dengan metode e-katalog akan berpengaruh terhadap kinerja pengadaan yang kemudian dapat mempengaruhi kinerja proyek. Untuk mendapatkan kinerja pengadaan yang baik dan tepat akan dilakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan *e-purchasing*. Dari variabel yang ada akan diidentifikasi keterkaitannya dengan kinerja pengadaan untuk kemudian dihasilkan respon tindakan untuk mendukung kinerja pengadaan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan pada proses pengadaan *e-purchasing* dengan metode e-katalog untuk bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
2. Objek penelitian adalah proses pengadaan *e-purchasing* dengan metode e-katalog berupa pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengadaan pekerjaan yang ditinjau adalah khusus untuk pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada kinerja pelaksanaan pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan melalui e-katalog ?
2. Bagaimana pendapat ahli terhadap faktor yang berpengaruh signifikan untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan melalui e-katalog?
3. Bagaimana strategi penerapan faktor signifikan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Adalah :

1. Mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh signifikan pada kinerja pelaksanaan pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan melalui e-katalog.
2. Menyusun pendapat ahli terhadap faktor yang berpengaruh signifikan pada kinerja pelaksanaan pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan melalui e-katalog sehingga mendukung kinerja pengadaan bahan material tersebut.
3. Menyusun strategi penerapan faktor signifikan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadaan bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk penulis, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem e-purchasing dengan metode e-katalog.
2. Untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dapat menjadi rekomendasi tindakan dalam pelaksanaan pengadaan

bahan material pemeliharaan jalan dan jembatan melalui sistem e-purchasing dengan metode e-katalog.

3. Untuk akademisi dan peneliti, dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengadaan atau topik yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai pengadaan pekerjaan barang dengan sistem e-purchasing dengan metode e-katalog khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan alur yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Fenomena merupakan landasan dalam penelitian, dimana pada penelitian ini fenomena yang terjadi adalah adanya peningkatan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan sistem *e-purchasing*. Hal tersebut dapat menjadi dampak positif maupun negatif dalam kinerja pengadaan. Berangkat dari fenomena tersebut dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang melalui sistem *e-purchasing* dengan metode e-katalog terhadap kinerja pengadaan barang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *e-purchasing* dengan metode e-katalog tersebut. Kemudian dilakukan analisis hubungan antara variabel tersebut terhadap kinerja pengadaan *e-purchasing*. Hal tersebut menjadi landasan dalam penyusunan respon tindakan yang sesuai dan pengembangan evaluasi pengadaan guna mendukung kinerja pengadaan barang melalui sistem *e-purchasing* dengan metode e-katalog di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.